

KEK

Vol 16 No 1

Tahun 2012

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011**
- **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)**
- **Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009**
- **Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan**
- **Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peran Pemodal Asing**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 16	No. 1	Jakarta 2012	ISSN 1410-3249	Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI- LIP/08/2012)
------------------	---------	-------	--------------	----------------	---

**Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

KAJIAN

EKONOMI

KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI



**Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan :
Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat
Di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011**



**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi
Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)**



**Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2000-2009**



**Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea *Free Trade Area*
(AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan**



**Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan,
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peran Pemodal
Asing**

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus); Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009; Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan, serta Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peran Pemodal Asing. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu Ansoriyah Fadilah, Herry Sumardjito, Arief Daryanto, Musa Hubeis, Eriyatno, Telisa Aulia Falianty, Luthfi Hanifah, Sigit Setiawan, Roy M. Manurung, Andriansyah, Bayu Husodo, dan Ngapon.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2012
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Kumpulan Abstraksi	ix

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERCATAT DI BEI, 2005-2011**

Oleh: Ansoriyah Fadilah 1

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS)**

Oleh: Herry Sumardjito, Arief Daryanto, Musa Hubeis, dan Eriyatno 17

**DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000-2009**

Oleh: Telisa Aulia Falianty dan Luthfi Hanifah 37

**DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FREE
TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

Oleh: Sigit Setiawan 71

**PASAR MODAL DAN PEREKONOMIAN INDONESIA : BIAYA
KETERBUKAAN, PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM,
DAN PERAN PEMODAL ASING**

Oleh: Roy M. Manurung, Andriansyah, Bayu Husodo dan Ngapon 91

DAFTAR TABEL

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERCATAT DI BEI, 2005-2011

Tabel 4.1.	Ringkasan Data Statistik Struktur Modal Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Periode 2005-2011	7
Tabel 4.2.	Ringkasan Data Statistik Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Periode 2005-2011	9
Tabel 4.3.	Hasil Estimasi Data Panel Model Persamaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Periode 2005-2011	10

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS)

Tabel 5.1.	Persentase Berdasarkan Indikator Kinerja	26
------------	--	----

DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000-2009

Tabel 2.1.	Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	43
Tabel 3.1.	Jenis dan Sumber Data	46
Tabel 4.1.	Hasil Regresi dengan Efek Tetap	54
Tabel 4.2.	Hasil Regresi Variabel Penelitian dengan Efek Tetap	54
Tabel 4.3.	Hasil Uji Hipotesis Penelitian Dengan Efek Tetap	55

DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Tabel 5.1.	Variabel Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema AKFTA Indonesia ke Korea Selatan	82
Tabel 5.2.	Peningkatan Nilai Ekspor Indonesia ke Korea Selatan Sebagai Dampak AKFTA	83
Tabel 5.3.	Variabel Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema AKFTA Korea Selatan ke Indonesia	85
Tabel 5.4.	Peningkatan Nilai Ekspor Korea Selatan ke Indonesia Sebagai Dampak AKFTA	86

DAFTAR GAMBAR

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS)

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	21
Gambar 3.2. Alur Analisis Penelitian	21

DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000-2009

Grafik 1.1. Laju Inflasi 3 Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2001 – 2009	39
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Konseptual Penelitian	45
Grafik 4.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam ribuan rupiah)	47
Grafik 4.2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009	48
Grafik 4.3. Perkembangan Belanja Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam ribuan rupiah)	49
Grafik 4.4. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009	49
Grafik 4.5. Perkembangan Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009	50
Grafik 4.6. Kondisi Infrastruktur Jalan 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009	51
Grafik 4.7. Perkembangan UMP di 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam rupiah)	51
Grafik 4.8. Pertumbuhan UMP pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009	52
Grafik 4.9. Perkembangan Suku Bunga Riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009	52
Grafik 4.10. Pertumbuhan Suku Bunga Riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009	53

DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	77
Gambar 4.1 Kontribusi Ekspor Nonmigas Indonesia ke Negara Mitra Utama Tahun 2010	81
Gambar 4.2 Kontribusi Impor Nonmigas Indonesia dari tiap Negara Mitra Utama Tahun 2010	81
Gambar 5.1 Hasil Ramalan Ekspor RI ke Korsel tanpa Skema Tarif AKFTA (Dalam US\$ 000)	82
Gambar 5.2 Hasil Ramalan Ekspor Korsel ke RI Tanpa Skema Tarif AKFTA (Dalam US\$ 000)	84

**PASAR MODAL DAN PEREKONOMIAN INDONESIA : BIAYA
KETERBUKAAN, PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM,
DAN PERAN PEMODAL ASING**

Grafik 3.1. Pendapat tentang Besarnya Biaya Keterbukaan yang Harus Dikeluarkan Terkait Pada Saat Penawaran Umum, Keterbukaan Berkala dan Keterbukaan Karena Peristiwa Penting .	97
Grafik 4.1. Hubungan IHSG dan Net Beli Asing	100
Grafik 4.2. Perkembangan Nilai Kepemilikan Saham oleh Pemodal Asing dan Lokal	103

<p>MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012</p>
<p><i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i></p>
<p>ABSTRAKSI</p>
<p>Fadilah, Ansoriyah, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011 Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 1-16</p> <p><i>The purpose of this study was to analyze the impact of capital structure on financial performance of mining sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI). This study employed the descriptive analysis and a regression analysis of panel data. This study covered annual data of 30 mining sector companies listed in the BEI in a 7-year time horizon (2005-2011). The descriptive analysis showed that most of companies applied a low-leverage policy in their capital structure. In average, the companies generate a good financial performance, in terms of profitability ratios and market based ratios. The regression analysis of panel data showed that capital structure has a significant impact on the company's financial performance based on ROA, ROE, and PER, but have insignificant effect on the company's financial performance based on market-to-book value ratio.</i></p> <p><i>Keywords : Capital Structure, Financial Performance, Descriptive Analysis, Regression Analysis of Panel Data.</i></p>
<p>Sumardjito, Herry, et. al. (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan) Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus) Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 17 - 36</p> <p><i>Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dengan mengambil kasus pada Kantor Wilayah</i></p>

<p>MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012</p>
<p><i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i></p>
<p>ABSTRAKSI</p>
<p><i>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Reformasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002, sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2002. Kinerja DJP belum optimal, sehingga diperlukan upaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan peningkatan tax ratio. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan reformasi perpajakan dan sejauhmana penerapannya, (2) mengkaji efektivitas penerapan reformasi perpajakan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dan (3) memberikan rekomendasi agar reformasi perpajakan dapat diterapkan secara optimal. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan korelasional, serta sebab akibat dengan menggunakan analisis deskriptif dan ekonometrika (model regresi logistik). Menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa faktor penting yang diprediksi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang dicerminkan oleh peubah terikat Indikator Kinerja (IK) secara keseluruhan. Secara umum pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan belum meningkatkan kinerja pegawai DJP dan penerimaan pajak secara signifikan, sehingga pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan masih perlu ditingkatkan.</i></p> <p><i>Kata kunci: efektivitas reformasi perpajakan, kebijakan pajak, kinerja, reformasi administrasi pajak.</i></p>
<p>Falianty, Telisa Aulia, dan Hanifah, Luthfi, et. al. (Universitas Indonesia) Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009 Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 37-70</p> <p><i>This research is intended to analyze determining variables of regional inflation at cities of West Java Province during 2000 – 2009. This study is motivated by the facts that inflation is known as an important indicator for economic development planning. Therefore, managing inflation rate become important for government to arrange their national development planning. Managing national inflation should follow whit managing regional inflation.</i></p>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi

(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Thus, identifying regional inflation determining variables become important process for managing phase of regional inflation. Approximation for regional inflation determining variable are monetary variables and non monetary variables. Monetary variables consist of real interest rate, while non monetary variables consist of regional indigenous income (PAD), regional expenditure, infrastructure condition, minimum wages rate, and inflation rate of DKI Jakarta. Method research for analysis is utilizes data panel regression Of G2SLS (Generalized two stage least square) with fixed effect method. The findings of this study point out that regional inflation at cities of West Java Province significantly affected by real interest rate, minimum wages rate, infrastructure condition, inflation rate of DKI Jakarta, regional indigenous income (PAD), and regional expenditure. Thus, shown that cost push effect system and demand pull effect system is work on to determine regional inflation at cities of West Java Province. This research also finding that regional that regional interaction is influencing regional inflation rate as shown on interaction between DKI Jakarta Province and cities in West Java Province which presumptive cause by distribution system of goods, commodity, and services from production area to consumption area.

Keywords : Inflasi, regional, PAD, upah minimum, infrastruktur

Setiawan, Sigit, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 71 – 90

Preferential tariff scheme on ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) Trade Agreement in Goods have been above four years after its entry into force on July 1, 2007, as stated in Minister of Finance Decree Number 131/PMK.011/2007. Its impact assessment should be conducted to review the expected gains for Indonesia and its country partner, South Korea from joining the agreement. This study employed a quantitative approach to measure and analyze the gains received by the two countries in AKFTA Trade Agreement in Goods from the increase of export growth and export contribution to national income. From the forecasting model employed, it

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi

(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

showed that Indonesia gained more than Korea from AKFTA.

Keywords : free trade area, preferential trade, export, impact assessment, AKFTA

**Roy M. Manurung, Andriansyah, Bayu Husodo, dan Ngapon, et. al.
(Kementerian Keuangan)**

**Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan,
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peran Pemodal Asing**

**Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman
91 - 110**

This paper summarizes the results of the last three years of research conducted by the Economic Research Division of the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). The main topic of the research is related to the role of the capital market in the Indonesian economy, especially its role as the source of financing for business and as the alternative of investment for investors. The studies on the cost of disclosure, the use of IPO proceeds and the role of foreign investors will have special emphasizes.

Keywords: Pasar Modal, Perekonomian, Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Penawaran Umum, Pemodal Asing

DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FTA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN

oleh :
Sigit Setiawan¹

Abstract

Preferential tariff scheme on ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) Trade Agreement in Goods have been above four years after its entry into force on July 1, 2007, as stated in Minister of Finance Decree Number 131/PMK.011/2007. Its impact assessment should be conducted to review the expected gains for Indonesia and its country partner, South Korea from joining the agreement. This study employed a quantitative approach to measure and analyze the gains received by the two countries in AKFTA Trade Agreement in Goods from the increase of export growth and export contribution to national income. From the forecasting model employed, it showed that Indonesia gained more than Korea from AKFTA.

Keywords : free trade area, preferential trade, export, impact assessment, AKFTA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. *Preferential treatment* diberikan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di tiga sektor : sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuan dapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Proses perundingan awal AKFTA dimulai pada awal tahun 2005 dan pada tanggal 13 Desember 2005 Kerangka Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*) AKFTA dapat ditandatangani oleh para kepala negara ASEAN dan Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak saat itu, proses perundingan teknis di tiga sektor tersebut dimulai di mana perjanjian untuk ketiga sektor dapat diselesaikan dalam tahapan yang berbeda-beda. Kesepakatan perdagangan barang

¹ Peneliti pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal

dapat diselesaikan paling awal dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan barang AKFTA tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan dua kesepakatan lain di sektor perdagangan jasa dan sektor investasi baru dapat diselesaikan masing-masing pada tahun 2007 dan 2009. Kesepakatan perdagangan jasa ditandatangani oleh para menteri ekonomi saat KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, sedangkan perjanjian investasi AKFTA ditandatangani pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea bulan Juni 2009 di Pulau Jeju, Korea Selatan.

Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati upaya penghapusan ataupun pengurangan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif. Pada skema penghapusan atau pengurangan tarif tersebut diatur secara detil program penurunan dan atau penghapusan tarif secara progresif, yang dibagi atas kategori *Normal Track*, *Sensitive List*, dan *Highly Sensitive List*. Khusus untuk kategori *Normal Track* yang mencakup sebagian besar jenis produk, penurunan dilakukan secara bertahap sejak perjanjian perdagangan barang efektif berlaku hingga batas waktu seluruh pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 untuk Korea Selatan dan 1 Januari 2012 untuk ASEAN 6. Negara-negara ASEAN lain di luar ASEAN 6, atau yang bisa disebut CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam) diberikan fleksibilitas berupa tambahan waktu yang sifatnya bervariasi.

Dalam neraca perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2010, Indonesia dapat mencatat surplus sebesar US\$ 4,8 miliar. Jumlah ini meningkat 43,1% dibandingkan surplus perdagangan tahun 2009 yang sebesar US\$ 3,4 miliar. Total perdagangan kedua negara telah mencapai angka US\$ 20,3 miliar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 12,5 miliar dan impor sebesar US\$ 7,7 miliar. Angka tersebut merupakan kenaikan sebesar 57,36% dibanding total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US\$ 12,8 miliar. Sedangkan pada periode Januari-September 2011, total perdagangan kedua negara telah berjumlah US\$ 21,2 miliar atau naik 47,47% dibanding periode yang sama pada tahun 2010 sebesar US\$ 14,4 miliar. Perdagangan antar kedua negara menunjukkan kecenderungan positif, di mana rata-rata pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun terakhir (2006-2010) tercatat sebesar 15,97%.

Setelah perjanjian AKFTA ini berlangsung hampir lima tahun, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis kuantitatif terhadap kontribusi dari perjanjian tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Perjanjian perdagangan barang AKFTA merupakan salah satu sektor penting dari perjanjian AKFTA yang perlu dilakukan evaluasi atau *impact assessment*. Dalam hal ini, penilaian dampak suatu FTA perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan suatu FTA dapat dipenuhi (Plummer 2010).

Pendapatan nasional merupakan salah satu dari tiga indikator untuk menghitung dampak dari suatu FTA terhadap suatu negara dari aktivitasnya dalam

perdagangan internasional (Lloyd dan McLaren 2004: 451). Dalam model Keynesian empat sektor, salah satu komponen pendapatan nasional adalah kontribusi ekspor. Adanya perubahan positif kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungannya dengan perdagangan Indonesia-Korea Selatan mengindikasikan dampak positif dari AKFTA terhadap kedua negara.

1.2. Tujuan, dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kuantitatif untuk mengkalkulasi seberapa besar dampak berlakunya perjanjian perdagangan barang AKFTA terhadap kontribusinya bagi pendapatan nasional Indonesia dan Korea Selatan. Dalam menganalisis dampak suatu FTA, metode analisis kuantitatif memiliki keunggulan kapasitas dibandingkan analisis kualitatif dalam mengukur secara jelas dampak FTA terhadap perdagangan dan ekonomi. Dalam kajian FTA, sifat deskriptif memberikan keterbatasan bagi analisis kualitatif.²

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah di sektor perdagangan barang dalam kerangka AKFTA dalam kaitannya dengan dampaknya bagi peningkatan pendapatan nasional khususnya dan perekonomian pada umumnya bagi Indonesia dan Korea Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA Antara ASEAN dan Korea Selatan

ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) merupakan perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan yang bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di tiga sektor utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Di perdagangan barang, upaya yang dilakukan adalah melalui penghapusan ataupun pengurangan hambatan-hambatan tarif ataupun non tarif.

Berdasarkan pasal 2.1 Kerangka Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Korea mengenai perdagangan barang, baik ASEAN dan Korea Selatan secara progresif telah menyepakati suatu skema penurunan dan penghapusan bea masuk (tarif) dan regulasi lain (non-tarif) yang bersifat menghambat. Pengecualian jenis barang dari skema tersebut diatur dalam pasal XXIV(8)(b) GATT 1994).

² Plummer (2010)

Perjanjian Perdagangan Barang AKFTA mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada :

- (a) aturan detil yang mengatur program penurunan dan atau penghapusan tarif tarif progresif dan juga hal-hal terkait lain;
- (b) *rules of origin* (ROO) ;
- (c) modifikasi komitmen
- (d) kebijakan non-tarif, *sanitary and phytosanitary measures*, dan hambatan teknis perdagangan;
- (e) kebijakan perlindungan;
- (f) disiplin dan pengurangan, penghapusan hambatan non-tarif berdasarkan WTO

2.2. *Preferential Tariff* AKFTA

Indonesia turut serta dalam perjanjian perdagangan barang AKFTA dengan mempertimbangkan beberapa manfaat yang akan diperoleh. Dari sisi akses pasar, Indonesia akan dapat meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke Korea Selatan seiring dengan implementasi penghapusan tarif masuk Korea Selatan secara bertahap yang terbagi dalam beberapa kategori penghapusan tarif: (1) *Normal Track*, (2) *Sensitive List*, dan (3) *Highly Sensitive List*. Korea Selatan memulai kategori *Normal Track* dengan melakukan penghapusan 70% pos tarif saat perjanjian efektif berlaku, \pm 95% pos tarif Korea Selatan pada tahun 2008, dan seluruh pos tarif Korea Selatan pada tahun 2010. Jenis produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan yang dapat menikmati penghapusan tarif *Normal Track* antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, dan produk kayu. Sebagai timbal balik, dalam skema *Normal Track* Indonesia dan negara ASEAN 6 lainnya memberikan konsesi tarif dengan penurunan 50% pos tarif menjadi 0-5% sejak perjanjian barang efektif berlaku, minimal 90% tarif paling lambat 1 Januari 2009, dan menghapus seluruh pos tarif paling lambat 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% pos tarif dan tenggat waktu tarif menjadi 0% dapat diundur paling lambat 1 Januari 2012.

Terkait dengan *Sensitive Track*, produk yang masuk ke dalam kategori *Sensitive Track* adalah produk yang dianggap sensitif dan akan diturunkan tarif bea masuknya dengan pola yang lebih lambat dari produk dalam kategori *Normal Track*. Terdapat 464 pos tarif (HS-6 digit) yang masuk dalam daftar produk *Sensitive Track* perjanjian AKFTA. Ke-464 pos tarif tersebut antara lain produk-produk yang terkait dengan perikanan, beras, gula, *wine-alcohol*, produk kimia, tekstil, dan baja.

Batas maksimum jumlah pos tarif dalam *Sensitive Track* ASEAN 6 & Korea Selatan adalah 10% dari total pos tarif (Total HS. 6 Digit = 5.225 pos tarif atau

Total HS. 10 Digit = 11.171 pos tarif) dan 10% dari total nilai impor dari Korea Selatan atau dari anggota ASEAN secara keseluruhan berdasarkan data perdagangan tahun 2004. *Sensitive Track* dibagi menjadi 2 yaitu:

(i) *Sensitive List* (SL)

- Menurunkan tarif MFN yang berlaku pada *Sensitive List* menjadi 20% paling lambat 1 Januari 2012.
- Tarif ini akan secara bertahap diturunkan menjadi 0-5% paling lambat 1 Januari 2016.

(ii) *Highly Sensitive List* (HSL), dengan batas maksimum 200 pos tarif (HS 6-digit) atau

3% dari keseluruhan pos tarif (berdasarkan HS digit yang dipilih) dan 3% dari total

nilai impor individu negara-negara ASEAN dari Korea Selatan dan sebaliknya berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004.

ASEAN dan Korea Selatan menyepakati penggunaan *general rule* untuk mengatur *rules of origin* suatu barang yaitu dengan menggunakan *regional value content* tidak kurang dari 40% FOB (dikenal dengan RVC-40) atau *Change of Tarif Heading* (CTH) dan *Product Special Rules* (PSR) untuk produk-produk yang tidak menggunakan *general rule*.

2.3. Implementasi Kesepakatan Tarif AKFTA dalam Regulasi Domestik

Dalam rangka mengatur implementasi AKFTA, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dari tingkat presiden hingga tingkat menteri. Ratifikasi kerangka perjanjian kerja sama ekonomi AKFTA telah dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive economic Co-Operation Among The Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*. Terkait dengan pengaturan tarif sebagai bagian dari kesepakatan perjanjian perdagangan barang AKFTA, Menteri Keuangan telah menerbitkan serangkaian peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free Trade Area* yang berlaku efektif 1 Juli 2007.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free Trade Area* yang dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Juli 2007.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free trade area* dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free trade area* yang berlaku efektif 1 Januari 2009. PMK ini merupakan PMK terakhir saat penelitian ini berlangsung.

2.4. Kerangka Teoritis

Penelitian Dee (2011) dengan menggunakan model CGE menyimpulkan bahwa peningkatan keterbukaan suatu pasar yang diakibatkan kebijakan liberalisasi perdagangan (antara lain *free trade agreement/FTA*, *preferential trade agreement/PTA*, *custom union*, *common market*) dapat menyebabkan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas. Bagi negara yang menderita lonjakan kenaikan tingkat pengangguran akibat krisis ekonomi saat ini, manfaat dalam jangka pendek adalah menurunnya tingkat pengangguran. Sedangkan manfaat dalam jangka panjang adalah makin mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan produktivitas.

Dari sudut pandang teori *international trade*, dampak positif dari suatu FTA atau PTA (misalkan AKFTA) dapat dijelaskan dalam model-model *preferential trade* (Markusen 1995). Dalam berbagai model tersebut (dalam konteks AKFTA), *preferential trade* akan menyebabkan terjadinya *trade creation* dan *trade diversion* yang akan meningkatkan *domestic welfare* Indonesia dan Korea Selatan. Dalam model sederhana *preferential trade*, *trade creation* akan meningkatkan *domestic welfare* dari kedua pihak. Dalam model *preferential trade* yang lebih kompleks di mana diasumsikan terdapat substitusi dalam konsumsi barang yang diperdagangkan, *trade diversion* dapat meningkatkan *economic welfare*. Sedangkan dalam model *preferential trade* dengan pendekatan Heckscher-Ohlin di mana diasumsikan kurva *production possibility* tidak linier, *trade diversion* juga dapat meningkatkan *economic welfare*.³

Selanjutnya Llyod dan MacLaren (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel endogen yang paling terkait dalam penilaian dampak suatu FTA terhadap negara-negara anggota dan non-anggota, yaitu: (1) pendapatan nasional, (2) *terms of trade*, dan (3) kesejahteraan (*welfare*).

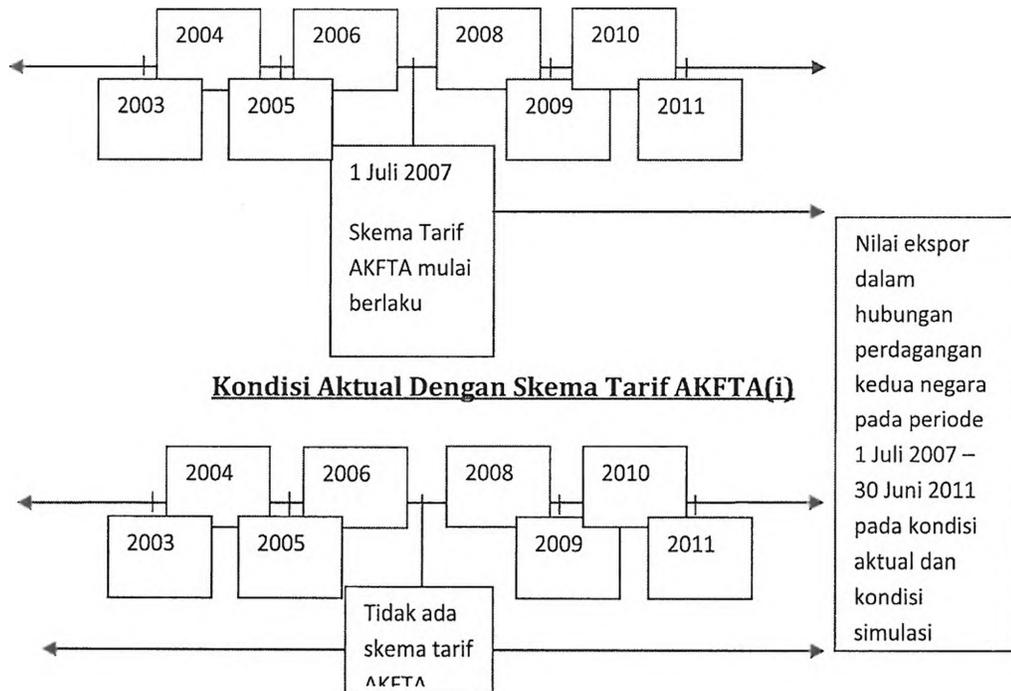
³ Markusen (1995) pp. 312-320

III. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007 tanggal 30 Oktober 2007, skema umum tarif AKFTA yang telah dipaparkan pada bagian 2.2 mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2007, sehingga saat penulisan ini disusun (tahun 2012) skema tersebut telah berjalan lebih dari empat tahun.

Penelitian ini akan mensimulasikan bagaimana seandainya periode 1 Juli 2007- 31 Juni 2011 tidak ada skema tarif AKFTA, sehingga dengan membandingkan dengan kondisi aktual pada periode yang sama (di mana sebenarnya skema tarif AKFTA sudah efektif berlaku) dapat dihitung dampak dari pemberlakuan skema tarif AKFTA pada periode tersebut terhadap pendapatan nasional. Kontribusi terhadap pendapatan nasional akan dihitung melalui perbandingan besar peningkatan nilai ekspor barang dalam hubungan perdagangan Indonesia – Korea Selatan dengan skema tarif AKFTA dan dengan hasil simulasi tanpa skema tarif AKFTA. Peningkatan nilai ekspor mempengaruhi pendapatan nasional kedua negara, mengingat nilai ekspor merupakan salah satu komponen dalam pendapatan nasional model Keynesian empat faktor.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Simulasi Kondisi Tanpa Skema Tarif AKFTA (ii)

Sumber : Penulis

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengukur dampak keterbukaan pasar melalui FTA bagi Indonesia dan Korea Selatan adalah dari sisi kontribusi terhadap pendapatan nasional sebagaimana dikemukakan oleh Dee (2011) dan Llyod dan MacLaren (2004). Bila kontribusi tersebut positif, maka FTA tersebut berdampak positif bagi kedua negara, dan berlaku sebaliknya.

Secara prinsip, filosofi metode yang digunakan penulis ini mirip dengan metode counterfactual sebagaimana yang terdapat dalam referensi metodologi asesmen FTA dari ADB yang ditulis oleh Plummer (2010). Metode tersebut mengisolasi pengaruh FTA dari pengaruh faktor-faktor ekonomi lain dan merupakan taksiran hipotetis kondisi perdagangan tanpa FTA. Kondisi perdagangan dengan FTA dan tanpa FTA kemudian diperbandingkan. Dalam metode *counterfactual* diasumsikan bahwa pengaruh faktor-faktor lain di luar FTA terhadap tren aliran perdagangan akan sama dengan atau tanpa FTA.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kontribusi terhadap pendapatan nasional diukur dari perbandingan besar peningkatan nilai ekspor kedua negara dengan skema tarif AKFTA dan hasil simulasi tanpa skema tarif AKFTA pada periode tertentu. Keterbukaan pasar sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor dengan skema tarif AKFTA relatif dibandingkan dengan simulasi tanpa skema tarif AKFTA menunjukkan terjadinya peningkatan keterbukaan pasar, *trade creation* dan *trade diversion* sebagaimana teori perdagangan internasional dan model-model *preferential trade*, di mana ketiga faktor tersebut berkontribusi positif bagi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan produktivitas, dan *economic welfare* dari negara-negara yang menjadi anggotanya, khususnya Indonesia dan Korea Selatan yang menjadi obyek studi kasus ini.

Diasumsikan dalam penelitian ini bahwa faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan pada masa sesudah titik waktu berlakunya AKFTA 1 Juli 2007 adalah skema tarif AKFTA, sedangkan faktor-faktor ekonomi lain yang mungkin mempengaruhi perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada periode 1 Juli 2007 – 31 Juni 2011 bersifat tetap (*ceteris paribus*) atau tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.

3.1. Metode Analisis

Untuk mensimulasikan kondisi tanpa skema AKFTA digunakan model perhitungan rata-rata geometrik yang disarankan oleh Plummer (2010) untuk metode *counterfactual*. Dari rata-rata geometrik data nilai historis ekspor, akan dihasilkan angka dugaan nilai ekspor tanpa AKFTA.

Persamaan rata-rata geometrik tersebut dinyatakan sebagai berikut :

$$U_n = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_{n-1}}$$

Kondisi perdagangan dengan FTA dan tanpa FTA kemudian diperbandingkan. Diasumsikan bahwa pengaruh faktor-faktor lain di luar FTA terhadap tren aliran perdagangan akan sama dengan atau tanpa FTA.

Jangkauan n yang digunakan penulis agar tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek dan dapat menggambarkan trend grafik nilai ekspor Indonesia dan Korea Selatan adalah periode 36 bulan ke belakang. Untuk diketahui, jangkauan maksimal ke belakang perhitungan rata-rata geometrik dengan Microsoft Excel adalah 48 bulan.

3.2. Data dan Variabel Penelitian

Sumber data adalah data ekspor non migas Indonesia ke Korea Selatan dan data impor non migas Indonesia dari Korea Selatan yang disusun oleh Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam situs www.bi.go.id. Dalam skema AKFTA, hanya pos tarif ekspor non migas yang memperoleh *preferential tariff*. Data *time series* relevan yang tersedia adalah data ekspor bulanan periode Januari 1990 – Juni 2011 (210 data) dan data impor bulanan periode Januari 2000 – Juni 2011 (90 data). Data impor non migas Indonesia dari Korea Selatan digunakan sebagai data ekspor non migas Korea Selatan ke Indonesia.

Variabel dalam penelitian ini adalah ekspor Indonesia dan ekspor Korea Selatan dengan skema tarif AKFTA, serta hasil simulasi ekspor Indonesia dan ekspor Korea Selatan tanpa skema tarif AKFTA. Periode pengamatan variabel penelitian adalah 1 Juli 2007-30 Juni 2011.

IV. ANALISIS STRUKTUR PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Perdagangan ASEAN-Korea Selatan tetap kokoh di tengah krisis ekonomi dan keuangan global yang dipicu oleh kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada kuartal IV tahun 2008 dan kemudian menjalar ke seluruh belahan dunia. Walau tahun 2009 perdagangan global turun 22,6%, total perdagangan antara ASEAN dan Korea Selatan menunjukkan kinerja yang kokoh dengan mengalami penurunan hanya sebesar 4,5% dibandingkan total perdagangan tahun sebelumnya, dari US\$ 78,3 miliar menjadi US\$ 74,7 miliar. Total nilai perdagangan tahun 2009 antara ASEAN dan Korea Selatan tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan nilai perdagangan pada tahun 2007 yang merupakan periode sebelum krisis sebesar US\$ 61,2 miliar. Namun demikian, total arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) dari Korea Selatan menurun sebesar 10,21% pada tahun 2009 dengan ASEAN menerima jumlah substansial FDI tahun lalu sebesar US\$ 1,4 miliar.

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Korea Selatan, terlebih setelah berlakunya kesepakatan perdagangan ASEAN-Korea FTA. Total perdagangan nonmigas Indonesia dan Korea Selatan mencapai US\$ 13,1 miliar (2010), di mana ekspor Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2010 mencapai US\$ 7,6 miliar dan impor Indonesia dari Korea Selatan pada tahun yang sama mencapai US\$ 5,5 miliar dollar. Jumlah tersebut merupakan 6% dari total ekspor maupun total impor Indonesia.

Sedangkan dari neraca perdagangan keseluruhan baik migas maupun nonmigas, total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2010 mencapai US\$ 20,3 miliar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 12,5 miliar dan impor sebesar US\$ 7,7 miliar. Nilai perdagangan tersebut naik 57,36% dibanding total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US\$ 12,8 miliar.

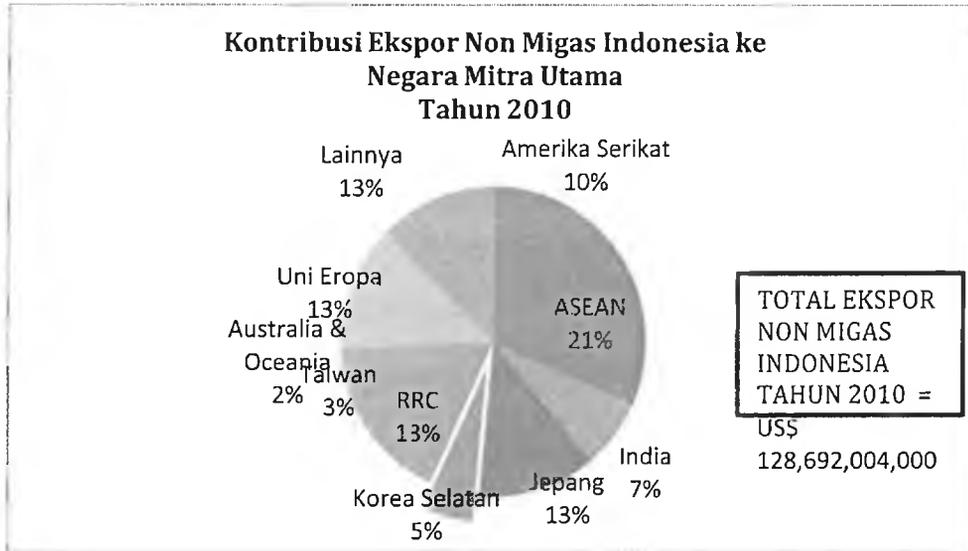
Dari sisi total perdagangan, kedua negara selama 5 (lima) tahun terakhir (2006-2010) mencatat pertumbuhan positif rata-rata sebesar 15,97% dengan surplus perdagangan berada pada sisi Indonesia. Pada tahun 2010 Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US\$ 4,8 miliar, atau naik 43,1% dibandingkan dengan tahun 2009 di mana Indonesia mencatat surplus sebesar US\$ 3,4 miliar.

Berdasarkan data terakhir BPS, total perdagangan kedua negara selama periode Januari-September 2011 adalah sebesar US\$ 21,2 miliar atau naik 47,47% dibanding periode yang sama pada tahun 2010 sebesar US\$ 14,4 miliar. Indonesia mencatat surplus sebesar US\$ 2,6 miliar, yang merupakan penurunan sebesar 21% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 yang mencatat surplus sebesar US\$ 3,2 miliar.

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan didominasi oleh hasil tambang yaitu batubara dan bijih tembaga. Data BPS tahun 2009 mencatat ekspor batubara dan bijih tembaga masing-masing sebesar US\$ 1,9 miliar dan US\$ 1 miliar. Selanjutnya ekspor komoditi pada tahun yang sama diikuti oleh logam olahan (US\$ 332 juta), tekstil dan produk tekstil (US\$ 180 juta), karet alam (US\$ 160 juta) dan pulp kertas (US\$ 130 juta).

Sementara itu ekspor Korea Selatan ke Indonesia (atau impor Indonesia dari Korea Selatan) didominasi oleh produk hasil pengolahan logam (US\$ 590 juta), elektronik (US\$ 501 juta), kain dan serat kain (US\$ 434 juta), senyawa kimia (US\$ 323 juta) dan peralatan dan mesin listrik (US\$ 152 juta).

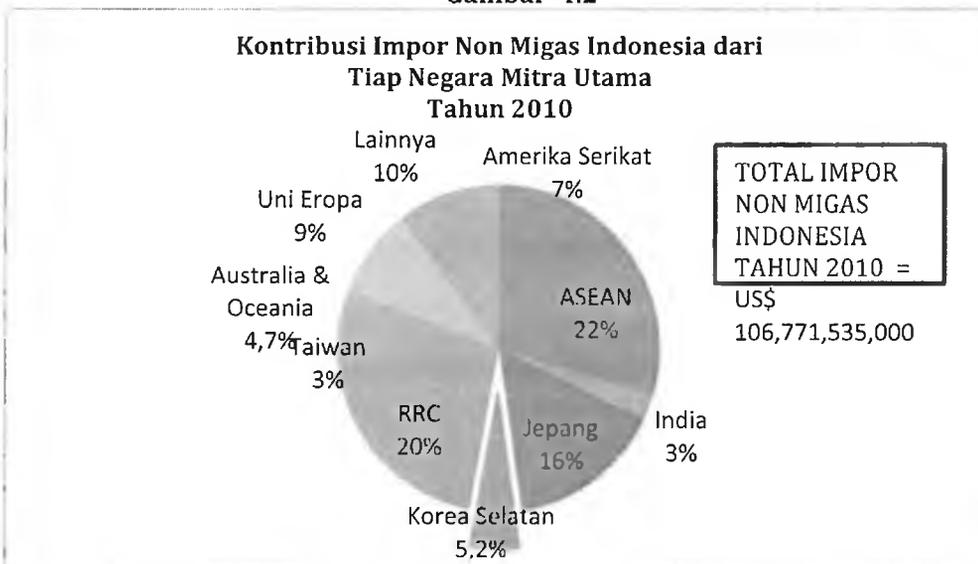
Gambar 4.1



Sumber : Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan pada www.bi.go.id, diolah

Pada tahun 2010 Korea Selatan menduduki peringkat 7 negara tujuan ekspor dan peringkat 6 negara asal impor Indonesia. Kontribusi ekspor Indonesia ke Korea Selatan dari total ekspor Indonesia adalah sebesar 5,3% dan kontribusi impor dari Korea Selatan adalah sebesar 5,2% dari total impor Indonesia. ASEAN masih menjadi tujuan ekspor dan impor utama Indonesia.

Gambar 4.2



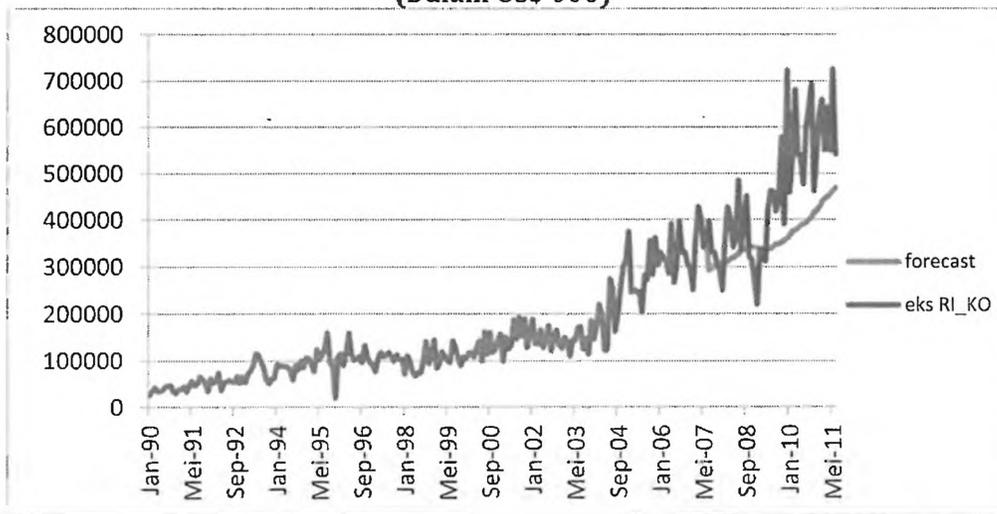
Sumber : Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan pada www.bi.go.id, diolah

V. HASIL PERAMALAN DAN ANALISIS

5.1. Ekspor Indonesia Ke Korea Selatan

Data ekspor *time series* Indonesia ke Korea Selatan yang tersedia yang diambil untuk input model ARIMA adalah data ekspor bulan Januari 1990 - Juni 2011. Akhir data pengamatan yang diambil disesuaikan dengan periode satu tahun pengamatan dalam penelitian ini. Mengingat AKFTA berlaku efektif sejak 1 Juli 2007, maka periode pengamatan satu tahun akan berawal pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada 30 Juni tahun berikutnya.

Gambar 5.1
Hasil Ramalan Ekspor RI ke Korsel Tanpa Skema Tarif AKFTA
(Dalam US\$ 000)



Sumber : Hasil analisis

Tabel 5.1
Variabel Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema
AKFTA
Indonesia ke Korea Selatan

Periode		Total nilai ekspor (US\$000)
Pra AKFTA	Juli 2003-Juni 2004 (1)	2,006,559
	Juli 2004-Juni 2005 (2)	2,916,450
	Juli 2005-Juni 2006 (3)	3,769,111
	Juli 2006-Juni 2007 (4)	4,105,539

Pasca AKFTA berlaku		Kondisi Aktual (Dengan Skema AKFTA)	Hasil Estimasi Simulasi Tanpa Skema AKFTA
	Juli 2007-Juni 2008 (1)	4,288,068	3,717,358
	Juli 2008-Juni 2009 (2)	4,169,207	4,056,954
	Juli 2009-Juni 2010 (3)	6,254,087	4,388,991
	Juli 2010-Juni 2011 (4)	7,250,595	5,179,544

Sumber : Hasil analisis

Total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan selama 4 tahun setelah berlaku skema preferential *tariff* AKFTA (yaitu periode Juli 2007 - Juni 2011) adalah US\$ 21,961,957,000. Sedangkan bila tidak ada skema preferential *tariff* AKFTA, total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan akan hanya mencapai US\$ 17,342,847,080. Dengan demikian, adanya preferential *tariff* AKFTA telah memberikan dampak pada peningkatan total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan *net* selama 4 tahun sejak berlakunya AKFTA sebesar US\$ 4,619,109,922 atau rata-rata US\$1,154,777,480 per tahunnya.

Untuk kondisi aktual di mana skema AKFTA berlaku, dengan membandingkan antara data pasca AKFTA periode 4 dan data pra AKFTA periode yang sama dapat diketahui bahwa nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan telah meningkat sebesar 76,6% atau rata-rata tumbuh sebesar 19,15% per tahunnya.

Tabel 5.2
Peningkatan Nilai Ekspor Indonesia ke Korea Selatan Sebagai Dampak AKFTA

URAIAN	Peningkatan nilai ekspor
Tanpa Skema AKFTA	6,54% p.a.
Dengan Skema AKFTA	19,15% p.a.
Peningkatan nilai ekspor sebagai dampak AKFTA	12,61% p.a.
Derajat peningkatan ekspor sebagai dampak AKFTA	2,93 kali lipat p.a.

Sumber : Hasil analisis

Untuk simulasi kondisi tanpa skema tarif AKFTA, dengan membandingkan antara data pasca AKFTA periode 4 dan data pra AKFTA pada periode yang sama dapat diketahui bahwa nilai ekspor hanya akan meningkat sebesar 26,2% saja atau rata-rata tumbuh sebesar 6,54% per tahunnya. Dengan demikian berlakunya skema tarif AKFTA memberikan dampak pada peningkatan ekspor Indonesia ke

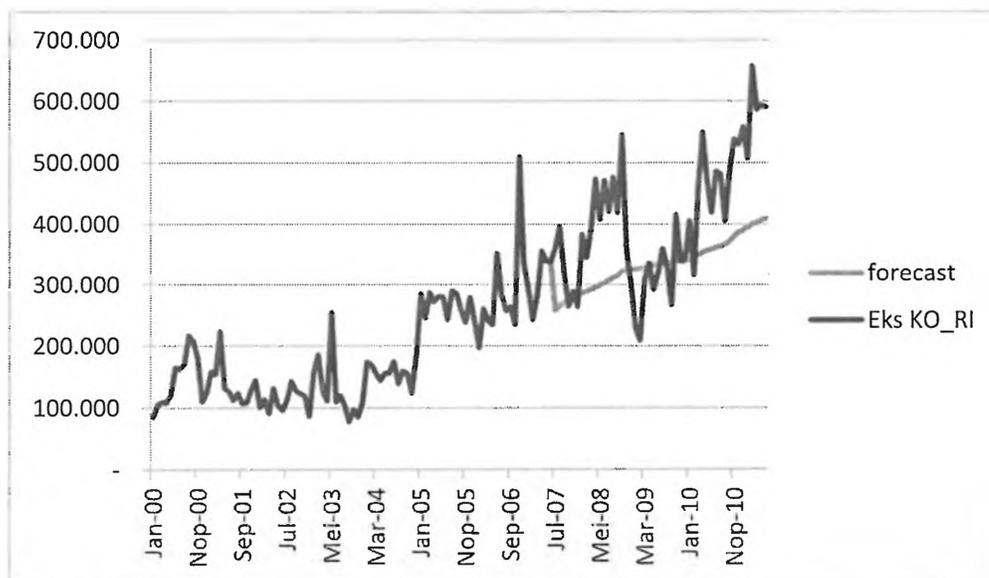
Korea Selatan lebih dari 12% (secara persentase) atau secara nominal meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan bila tidak ada skema tarif AKFTA.

Bila diasumsikan dalam dua tahun mendatang (Juli 2011 - Juni 2012) dan (Juli 2012 - Juni 2013) tingkat pertumbuhan tetap sebesar 19,15% per tahun, nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan berpotensi meningkat masing-masing menjadi US\$ 8,639,178,040 dan US\$ 10,293,692,754.

Potensi pertumbuhan ekspor non migas dengan skema tarif AKFTA akan lebih besar lagi bila lebih banyak lagi eksportir Indonesia yang memanfaatkan fasilitas tarif khusus AKFTA. Dengan tingkat pemanfaatan tarif AKFTA sebesar 55,8 persen saja⁴ telah diperoleh rata-rata kenaikan kontribusi ekspor nonmigas terhadap pendapatan nasional Indonesia lebih dari US\$ 1 miliar per tahunnya dan telah melipatgandakan kontribusi ekspor nonmigas hampir 3 kali lipat.

5.2. Ekspor Korea Selatan Ke Indonesia

Gambar 5.2
Hasil Ramalan Ekspor Korsel ke RI Tanpa Skema Tarif AKFTA
(dalam US\$ 000)



Sumber : Hasil analisis

⁴ Data Kementerian Perdagangan Januari – April 2011 (Harian Analisa, 2011).

Tabel 5.3
Variabel Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema AKFTA Korea Selatan ke Indonesia

Periode		Total nilai ekspor (US\$000)	
Pra AKFTA	Juli 2003-Juni 2004	1,546,912	
	Juli 2004-Juni 2005	2,916,450	
	Juli 2005-Juni 2006	3,769,111	
	Juli 2006-Juni 2007	3,739,157	
Pasca AKFTA berlaku		Kondisi Aktual (Dengan Skema AKFTA)	Hasil Estimasi Simulasi Tanpa Skema AKFTA
	Juli 2007-Juni 2008	4,363,667	3,401,549
	Juli 2008-Juni 2009	4,213,687	3,893,112
	Juli 2009-Juni 2010	4,674,953	4,137,050
	Juli 2010-Juni 2011	6,421,486	4,637,009

Sumber : Hasil analisis

Total nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia selama 4 tahun setelah berlaku skema *preferential tariff* AKFTA (yaitu periode Juli 2007 - Juni 2011) adalah US\$ 19,673,793,000. Sedangkan bila tidak ada skema *preferential tariff* AKFTA, total nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia akan hanya mencapai US\$ 16,068,719,000. Dengan demikian, adanya skema *preferential tariff* AKFTA telah memberikan dampak pada peningkatan total nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia *net* selama 4 tahun sejak berlakunya AKFTA sebesar US\$3,605,074,362 atau rata-rata US\$ 901,268,591 per tahunnya.

Untuk kondisi aktual di mana skema AKFTA berlaku, dengan membandingkan antara data pasca AKFTA periode 4 dan data pra AKFTA periode yang sama dapat diketahui bahwa nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia telah meningkat sebesar 71,7% atau rata-rata tumbuh sebesar 17,93% per tahunnya.

Tabel 5.4
Peningkatan Nilai Ekspor Korea Selatan ke Indonesia
Sebagai Dampak AKFTA

URAIAN	Peningkatan Nilai Ekspor
Tanpa Skema AKFTA	6% p.a.
Dengan Skema AKFTA	17,9% p.a.
Peningkatan nilai ekspor sebagai dampak AKFTA	11,9% p.a.
Derajat peningkatan ekspor sebagai dampak AKFTA	3 kali lipat p.a.

Sumber : Hasil analisis

Untuk simulasi kondisi tanpa skema tarif AKFTA, dengan membandingkan antara data pasca pasca AKFTA periode 4 dan data pra AKFTA periode yang sama dapat diketahui bahwa nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 24% saja atau rata-rata tumbuh sebesar 6% per tahunnya. Dengan demikian berlakunya skema tarif AKFTA memberikan dampak pada peningkatan ekspor Korea Selatan ke Indonesia mendekati 12% (secara persentase) atau secara nominal meningkat menjadi 3 kali lipat dibandingkan bila tidak ada skema tarif AKFTA.

Bila diasumsikan dalam dua tahun mendatang (Juli 2011 - Juni 2012) dan (Juli 2012 - Juni 2013) tingkat pertumbuhan tetap sebesar 17,9% per tahun, nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia berpotensi meningkat masing-masing menjadi US\$ 7,573,118,448 dan US\$ 8,931,285,224.

VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama diuntungkan dengan pemberlakuan skema tarif AKFTA, namun dalam hal ini Indonesia menerima manfaat lebih besar dibandingkan Korea Selatan. Dengan adanya skema *preferential tariff* untuk barang, secara jangka panjang manfaat tersebut dapat dilihat dari tren positif peningkatan aktivitas ekspor dalam hubungan perdagangan kedua negara.

Dari perspektif Indonesia, berdasarkan analisis perbandingan kondisi dengan AKFTA dan hasil simulasi kondisi tanpa AKFTA selama periode pengamatan 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Juni 2011, dapat diketahui bahwa skema tarif AKFTA telah memberikan dampak terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan rata-rata sebesar US\$ 1,154,777,480 per tahunnya. Dengan demikian adanya skema AKFTA memberikan dampak langsung melalui

peningkatan kontribusi nilai ekspor terhadap pendapatan nasional Indonesia sebesar rata-rata US\$ 1,154,777,480 per tahun.

Secara persentase, pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan meningkat rata-rata sebesar 12,61% setiap tahunnya sebagai akibat dampak AKFTA, yang berarti peningkatan sekitar 3 kali lipat dibandingkan bila Indonesia tidak mengikuti AKFTA.

Sedangkan dari perspektif Korea Selatan, skema tarif AKFTA telah memberikan dampak terhadap peningkatan nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia rata-rata sebesar US\$ 901,268,591 per tahunnya. Besaran angka tersebut merupakan dampak langsung dari kontribusi nilai ekspor terhadap pendapatan nasional Korea Selatan. Pertumbuhan nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia akibat AKFTA secara persentase naik rata-rata sebesar 12% p.a. atau naik 3 kali lipat dibandingkan bila Korea Selatan tidak mengikuti AKFTA.

Peningkatan keterbukaan pasar akibat skema tarif AKFTA sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor dalam hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan telah terjadinya fenomena *trade creation* dan *trade diversion*. Berdasarkan teori perdagangan internasional, model-model *preferential trade*, dan studi empiris, secara tidak langsung AKFTA akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan produktivitas, dan *economic welfare* bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, khususnya Indonesia dan Korea Selatan sebagai obyek studi ini.

6.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan penulis terbagi dua, yakni rekomendasi yang terkait dengan kebijakan dan yang terkait dengan penelitian selanjutnya.

Beberapa rekomendasi terkait kebijakan yang perlu disampaikan adalah :

- Kebijakan Indonesia dalam mengikuti ASEAN-Korea FTA memberikan dampak positif bagi Indonesia dan Korea Selatan. Oleh karena itu, hubungan kemitraan tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan ke arah yang makin memberikan manfaat bagi keduanya. Salah satunya bisa melalui kesepakatan bilateral.
- Potensi pertumbuhan ekspor non migas dengan skema tarif AKFTA akan lebih besar lagi bila lebih banyak lagi eksportir Indonesia yang memanfaatkan fasilitas tarif khusus AKFTA. Dengan tingkat pemanfaatan tarif AKFTA sebesar 55,8 persen saja⁵ telah diperoleh rata-rata kenaikan kontribusi ekspor nonmigas terhadap pendapatan nasional Indonesia sebesar US\$1,35 miliar per tahunnya dan telah melipatgandakan kontribusi ekspor nonmigas hampir 13 kali lipat.

⁵ Data Kementerian Perdagangan Januari – April 2011 (Harian Analisa, 2011).

Hasil analisis ini dapat digunakan oleh Tim Tarif - yang administrasi kesekretariatannya dikelola oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal - sebagai bahan evaluasi kinerja dari implementasi kebijakan tarifnya selama ini. Diharapkan melalui evaluasi tersebut dapat dirumuskan upaya untuk mengefektifkan kebijakan tarif guna mengoptimalkan potensi kontribusi ekspor bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti Ditjen Bea Cukai-Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi eksportir dalam hal ini perlu dilibatkan.

Sedangkan beberapa rekomendasi bagi penyempurnaan penelitian selanjutnya terkait AKFTA adalah sebagai berikut :

- Terdapat beberapa model lain baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu FTA. Disarankan agar kajian selanjutnya dapat menggunakan model lain untuk memperkaya sudut pandang penilaian terhadap dampak dari AKFTA
- Perjanjian sektor-sektor perdagangan jasa dan investasi perlu juga dievaluasi dalam suatu kajian agar diperoleh gambaran utuh dampak AKFTA khususnya bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dee, Philippa et al. 2011. "The Impact of Trade Liberalisation on Jobs and Growth." *OECD Trade Policy Working Papers* No. 107.
- Enders, Walter. 2004. *Applied Econometric Time Series*. Second Edition. John Wiley & Sons.
- Grabowski, R.; Shields, M.S. 1996. *Development Economics*. Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika. Edisi ke-3*. Diterjemahkan dari *Essentials of Econometrics*. Erlangga. Jakarta`
- _____, dan Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometrics*. Mc-Graw Hill International Edition.
- Harian Analisa. 2011. *Tarif Preferensi FTA ASEAN-Korsel Belum Banyak Dimanfaatkan*, <http://www.analisadaily.com/>, Sabtu, 10 Des 2011 (diakses 23 Desember 2011).
- Hedy, Hamdy. 1998. *Ekonomi Internasional: teori dan kebijakan perdagangan internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Llyoid, Peter J. ; Maclaren, Donald. 2004. "Gains and Losses from Regional Trading Agreements: A Survey." *The Economic Record*. 80 (251). pp. 445-467
- Markusen, James R. et al. 1995. *International Trade, Theory and Evidence*. McGraw-Hill

- Obstfeld, M.1994. "Risk-taking, Global Diversification, and Growth. *American Economic Review* 84, pp.1310-1329.
- Plummer, Michael G.; Cheong, David; dan Hamanaka, Shintaro. 2010. *Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements*. Asian Development Bank.
- Supranto, J. 2009. *Statistik, Teori dan Aplikasi*, Edisi ke-7. Erlangga. Jakarta
- Tambunan, Tulus. 2000. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: teori dan temuan empiris*. Pustaka LP3ES. Jakarta
- Thompson, A.J. 1994. "Trade Liberalization, Comparative Advantage, and Scale Economies. Stock Market Evidence from Canada." *Journal of International Economics* Vol. 37, pp. 1-27.
- Yuce, Ayse; Rakhmanyil Sergiy. December 2010. "Internationalization and Profitability of the U.S. Multinational Companies After The Free Trade Agreement." *International Business & Economics Research Journal* Vol.9, No.12, pp. 49-75